

TAJUK RENCANA

Dugaan Manipulasi Data di Siskohat

PANSUS Haji DPR RI terus berupaya mengorek berbagai hal terkait penyelenggaraan ibadah haji. Meski awalnya Pansus dibentuk untuk menyelidiki pembagian tambahan quota haji 20.000, yang dibagi rata untuk haji reguler 10.000 dan haji khusus juga 10.000, namun dalam perkembangan, permasalahan melebar ke mana-mana. Terkini, Pansus mengungkap dugaan manipulasi data di Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu) Kemenag RI.

Sebagaimana diketahui, Siskohat adalah fasilitas pendataan seputar haji yang berisi di antaranya pencatatan keuangan atas pendaftaran, pelunasan atau pembatalan, dan lain-lain. Siskohat adalah alat pendukung kerja berbentuk teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan koneksi jaringan. Jaringan tersebut beserta data haji terhubung dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Adapun layanan yang bisa didapatkan melalui sistem Siskohat adalah pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan untuk validasi data.

Jadi, setiap pendaftar haji datanya akan masuk ke Siskohat, termasuk nomor porsinya yang dia dapat. Dengan nomor porsinya tersebut yang bersangkutan bisa mengetahui estimasi keberangkatannya, misalnya kemungkinan akan berangkat tahun berapa sesuai dengan urutan nomor porsinya yang dimiliki. Setiap akan dibuka masa pelunasan biaya haji, selalu diumumkan nomor porsinya berapa sampai berapa yang berhak melakukan pelunasan. Jadi, yang nomor porsinya tidak muncul, berarti belum bisa melakukan pelunasan saat itu dan tentu saja pada musim haji tahun tersebut yang bersangkutan belum bisa berangkat.

Dengan sistem ini tampaknya sulit bagi pemilik nomor porsinya lebih muda untuk melompati nomor porsinya lebih tua, kecuali saat masa pelunasan biaya haji pemilik nomor porsinya lebih tua tidak melakukan pelunasan, sehingga nomor porsinya bawahnya (lebih muda) akan naik dan berhak melakukan pelunasan. Namun terkait hal ini tentu saja nomor porsinya yang sudah

berdekatan. Mestinya, operator Siskohat juga tidak bisa mengubah nama-nama pemilik nomor porsinya, karena yang bersangkutan pasti mengetahui kalau diubah, karena di dokumen pendaftaran yang dimiliki ada nomor tersebut, sehingga nomor tersebut permanen sampai yang bersangkutan berangkat haji, kecuali kalau mengundurkan diri.

Karena itu ketika Pansus DPR RI melempar isu dugaan manipulasi data di Siskohat, maka harus ditelusur lebih jauh sehingga terungkap fakta yang sebenarnya. Kalau dugaan itu benar, sebagaimana diungkapkan Pansus, berdampak pada jadwal keberangkatan jemaah haji yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur, sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi. Bahkan Pansus juga mengungkap ditemukannya sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu 0 (nol) tahun (KR, Kamis 12/9).

Kalau mengacu pada pola kerja Siskohat, rasanya memang tidak masuk akan adanya 3.500 jemaah haji khusus yang bisa langsung berangkat. Sebab, nomor porsinya mereka mesti disisipkan di nomor yang mesti berangkat dan tentu saja mesti menggeser nomor-nomor porsinya sebanyak 3.500 orang. Ini jumlah yang tidak sedikit. Dan itu bukan sekadar angka, melainkan manusia-manusia yang ingin menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kalau itu betul, mestinya sebanyak 3.500 orang yang digeser tersebut mestinya protes semua, sebab keberangkatan haji mereka menjadi tertunda.

Karena itu, dugaan manipulasi tersebut harus diungkap tuntas. Kalau dugaan tersebut memang betul, maka harus dijelaskan secara gamblang. Kenapa bisa terjadi, bagaimana dengan 3.500 pemilik porsinya yang dilompati dan yang pasti Siskohat harus diperbaiki dan tak boleh dimanipulasi. Begitu juga jika sebaliknya, maka harus diakui dugaan tersebut tidak terbukti. Jadi, semuanya serba jelas. Semoga penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin baik. □-d

UU Perampasan Aset, Apa Pentingnya?

Yulianta Saputra

Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan, direktori keputusan MA, serta pemberitaan daring sepanjang masa tersebut, ditandakan terdapat 1.282 perkara dan 1.404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK juga Kejaksaan diperoleh kenyataan bahwa rerata hukuman penjara bagi koruptor pada 2021 hanya di kisaran 3 tahun 5 bulan penjara. Tak berhenti



KR-JOKO SANTOSO

di situ, dari gatra pemulihan kerugian negara pun sangat minim. Ditemukan gap kontras kerugian negara dampak korupsi tahun 2022 yang mencapai Rp 48,786 triliun, walakin kuantitas vonis pidana tambahan berupa uang pengganti dari antero kasus tersebut cuma di kisaran Rp 3,821 triliun.alias analog 7,83 persen dari total kerugian negara.

Mengingat fakta ironi berupa *punishment* ringan terhadap koruptor konstan terjadi semestinya sisi penindakan dalam proses peradilan mesti diperkuat dan para pemangku kepentingan perlu mendesak alternatif hukuman lain yang kapabel membuat kapok. ‘Pemiskinan koruptor’ tentunya bisa jadi salah satu opsi. Terlebih ide ‘pemiskinan koruptor’ sudah santer terdengar di kalangan publik selama ini. Di sini, ‘pemiskinan koruptor’ pun menjadi begitu relevan, sebab hal

tersebut memiliki dua aspek, yakni aspek penjaraan di bidang sosial dan ekonomi secara total terhadap pelaku pun familinya serta di sisi lain aspek penyelamatan kerugian keuangan negara *cum* proteksi korban secara maksimal. Kedua perspektif tersebut telah terakomodasi dalam RUU Perampasan Aset.

Sayangnya nasib RUU Perampasan Aset sampai kiwari masih mandek di meja pimpinan DPR. Padahal publik selama ini sudah acap mengetuk kalbu nurani legislator agar segera mengakselerasi eksistensi payung hukum Perampasan Aset. Diinsafi dengan perangkat hukum *a quo haqqul yakin* hukuman ‘pemiskinan koruptor’ dapat diberlakukan. Ketentuan seperti itu pun sejatinya sungguh krusial dalam koherensinya menguatkan iktihar pengembalian aset dari *natijah* korupsi. Kini sudah saatnya bangsa ini membuktikan bahwasanya negara kita benar-benar serius dalam hal memerangi korupsi.

Pada akhirnya, atas keberadaan RUU Perampasan Aset ini diperlukan kemauan politik dari para pembambil kebijakan agar segera diberi prioritas lantas selanjutnya dibahas syahdan diundangkan. Perihal ini urgen lantaran dengan adanya payung hukum Perampasan Aset maka aparat penegak hukum mempunyai dasar lebih kuat terkait aset-aset koruptor di mana pun aset tersebut disembunyikan sehingga negara kita pun dapat terbebas dari dominasi harta kotor koruptor. □-d

*) **Yulianta Saputra SH MH**, Dosen Prodi Ilmu Hukum, FSH, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Isu Megathrust dan Pariwisata

Hanan Wihasto

saja secara serta merta sebagai dampak ancaman tersebut.

Kita memang tidak menafikan bahwa catatan sejarah menunjukkan beberapa gempa besar pernah terjadi di Zona Megathrust Selatan Jawa, seperti gempa dengan magnitudo 7,0 hingga 7,9 yang terjadi pada tahun 1903, 1921, 1937, 1981, 1994, 2006, dan 2009. Selain itu, gempa dengan magnitudo 8,0 atau lebih besar pernah terjadi pada tahun 1780, 1859, dan 1943. Namun hal itu bukan berarti menjadi pembenaran ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu perlu kiranya untuk diluruskan kesalahpahaman tersebut. Walaupun para ahli mampu menghitung perkiraan Magnitudo maksimum gempa di zona megathrust, tetapi teknologi saat ini belum mampu memprediksi dengan tepat, apalagi memastikan kapan terjadinya gempa megathrust tersebut.

Bertitik tolak dari hal tersebut, seyogyanya masyarakat juga tidak membesar-besarkan isu gempa megathrust, namun tetap memaksimalkan persiapan mitigasinya. Wisatawan yang berkunjung diharapkan tidak merasa takut dan calon wisatawan tidak membatalkan rencana kunjungan wisatanya dan tidak termakan isu-isu megathrust. Masyarakat hendaknya bersikap arif dan bijaksana dalam memilah informasi di sosial media. Contoh bagus baru-baru ini ditunjukkan oleh TPR Parangtritis dan Depok, di mana pada 24 Agustus 2024 dikunjungi 8.163 orang, dan 31 Agustus 2024 dikunjungi 5.664 orang. Kunjungan meningkat pada Sabtu 7 September 2024 sebanyak 10.571 orang, karena ada acara Festival 1001 Lampion Terbang di

Kawasan Laguna Depok Parangtritis.

Seiring dengan itu para pelaku dan regulator industri pariwisata di Indonesia, seyogyanya lebih fokus menangkap isu-isu global terkait industri pariwisata antara lain seperti Program Pariwisata Digital, Meningkatkan jumlah startup atau perusahaan rintisan di bidang pariwisata, Digitalisasi Nomadic Tourism (Fenomena wisata di mana wisatawan lebih suka menjelajah dan berkunjung ke destinasi yang kurang konvensional), Pengembangan virtual (memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi destinasi melalui pengalaman virtual), menggelorakan *stay cation campaign*, di mana orang menghabiskan liburan mereka di daerah lokal daripada bepergian jauh. *Stay cation* dinilai dapat membantu menghidupkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Karena itu, banyak pihak saat ini mulai meningkatkan *stay cation campaign* melalui platform digital seperti media sosial. □-d

*) **Hanan Wihasto SE MM**, anggota ISEI, Dosen Tetap IBS STEI Yogyakarta & Dekan FE UCY 2019-2023.

Pojok KR

Pedagang tak mungkin kembali ke selasar Malioboro.

-- Sudah ditata baik-baik, harus dipatuhi.

Pemuda pilar untuk membangun desa.

-- Jangan semua merantau ke kota!

Pemberdayaan perempuan dongkrak ekonomi keluarga.

-- Perempuan bukan hanya ‘kanca wingking’.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN**: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008),
dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama**: Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab**: Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi**: Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana**: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi**: Ngabdul Wakid. **Redaktur**: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhamad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer**: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis** : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi**: Dra Hj Supriyanti.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm - . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail**: naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi**: Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.